



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Juni 2021

Nomor : R- 28 /Pres/ 06/2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penunjukan Wakil
Pemerintah untuk
membahas Rancangan
Undang-Undang tentang
Badan Usaha Milik Desa

Kepada Yth.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

di
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/05592/DPR RI/IV/2021 tanggal 21 April 2021 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Keuangan
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia